JADMENT: ***Journal of Administration & Development***
Published by Penerbit Forind
Vol. 3 No. 3 (2026) | Page 679-690
Website: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BRAKSENG DI SUMBER BRANTAS KOTA BATU

Implementation of Tourism Village Development Policy in Brakseng Sumber Brantas Batu City

Trinitas Sama Pere Sidi[1*]
Firman Firdausi[1]
Ignatius Adiwidjaja[1]

[1]Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang

[*]corresponding author:
rismaperesidi27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara terhadap lima informan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah didukung komunikasi dan komitmen Pemerintah Desa, BUMDes, serta masyarakat petani. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, prosedur administrasi, dan belum terselesaikannya standar operasional prosedur (SOP). Faktor pendukung meliputi landasan hukum, dukungan pemangku kepentingan, dan potensi pertanian. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan fasilitas, gangguan aktivitas pertanian, serta ketidakpastian ekonomi dan risiko gagal panen. Penguatan kapasitas pengelola dan tata kelola operasional diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pengembangan wisata.

Kata Kunci:
Implementasi kebijakan
Desa Wisata
Agrowisata
Tata kelola

Keywords:
Policy implementation
Tourism Village
Agrotourism
Governance

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the tourism village development policy in Brakseng, Sumber Brantas Village, Bumiaji District, Batu City, and identify its supporting and inhibiting factors. This research employed a descriptive qualitative approach using George C. Edward III's policy implementation framework, comprising four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews with five informants, observation, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that policy implementation has been supported by communication and commitment among the village government, Village-Owned Enterprise (BUMDes), and farming communities. However, implementation remains suboptimal due to limited human resources, inadequate infrastructure, administrative constraints, and the absence of finalized standard operating procedures (SOPs). Supporting factors include the regulatory framework, stakeholder commitment, and agricultural potential. Meanwhile, inhibiting factors include limited facilities, disruptions to farming activities, economic uncertainty, and crop failure risks. Strengthening management capacity and operational governance is therefore essential to ensure sustainable tourism village development.

© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Link: http://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index

Submite: 04-08-2026 *Accepted: 19-11-2026* *Published: 20-11-2026*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada perolehan devisa negara, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa. Pengembangan pariwisata di daerah pedesaan tidak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan tetapi juga

sebagai moto penggerak ekonomi lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Sektor pariwisata telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia secara konsisten menempatkan pariwisata sebagai sektor andalan untuk menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah (Yoeti, 2008).

Kebijakan pengembangan desa wisata merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal terutama di wilayah pedesaan yang kaya akan potensi alam dan budaya. Konsep ini menekankan keterlibatan masyarakat lokal secara aktif dalam mengelola potensi desa sebagai daya tarik utama, baik melalui kegiatan wisata berbasis alam maupun budaya. Menurut Nuryanti (1993), desa wisata merupakan integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang bersinergi dengan tradisi dan tata cara kehidupan lokal. Hal senada diungkapkan oleh Putra (2006), yang menekankan bahwa desa wisata harus mencerminkan keaslian budaya desa, sehingga mampu menarik wisatawan sekaligus mempertahankan identitas lokal.

Di Indonesia, pengembangan desa wisata mendapatkan dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan di selenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan memberdayakan masyarakat setempat. Arah pembangunan itu bertujuan untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial bagi komunitas lokal (Republik Indonesia, 2009).

Pengembangan desa wisata berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan budaya, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (Krisnawati,2021). Salah satu wilayah di Indonesia yang mengimplementasikan kebijakan pengembangan desa wisata adalah Kota Batu, Jawa Timur. Sejak ditetapkan sebagai daerah otonom pada 2001, Kota Batu menetapkan arah pembangunan sebagai sentra pariwisata dan agropolitan. Melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, pengembangan desa wisata memperoleh dasar hukum yang memungkinkan optimalisasi potensi desa. Saat ini terdapat 24 desa wisata aktif di Kota Batu yang masing-masing terus berupaya meningkatkan pengelolaan desa wisatanya sebagaimana yang dilakukan oleh Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Desa Sumber Brantas yang terletak di Kecamatan Bumiaji, merupakan salah satu desa yang di tetapkan oleh pemerintah Kota Batu sebagai salah satu lokasi pengembangan Desa Wisata Brakseng yang merupakan wisata alam berbasis pertanian yang berlokasi di sepanjang Kawasan lahan pertanian Brakseng sampai dengan Watu Tumpuk. Desa Sumber Brantas merupakan desa yang terletak diwilayah Barat Daya lereng Gunung Arjuno dan sebelah Timur gunung Anjasmoro sebelah Selatan Gunung Welirang merupakan daerah Pegunungan dan mempunyai hamparan lahan pertanian yang sangat subur, yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Melalui peraturan desa (Perdes) Tahun 2021 tentang Desa Wisata Kaki Langit (Wsata Brakseng). Dalam peraturan desa ini yang di maksud dengan desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Objek desa wisata ini adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang di bangun dan di kembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan di usahakan sebagai tempat yang di kunjungi wisatawan.

Penduduk Desa Sumber Brantas hampir keseluruhannya adalah petani yang pada umumnya menghasilkan produk pertanian sayur mayur dan Hortikultura yang sangat baik kualitasnya. Di Desa tersebut sesuai dengan namanya terdapat mata air Sungai Brantas yang mengaliri ke beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Desa ini memiliki lahan pertanian sayur-mayur yang memiliki luas lahan 1.500 Ha, termasuk gunung Arjuno welirang dan telah menjadi sentra produksi berbagai jenis sayuran untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun regional. Jumlah wisatawan Brakseng kisaran 40.000 an/tahun, melihat potensi ini, kebijakan pengembangan Desa Wisata di implementasikan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Secara ideal kebijakan ini di harapkan mampu mengubah petani dari sekedar produsen menjadi pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan pendapatan ganda dari hasil penjualan panen dan dari jasa pariwisata (Sudibya,2018). Proses implementasi kebijakan adalah tahapan yang krusial dan kompleks, sering kali di warnai oleh berbagai tantangan (Pramono,2020).

Menurut George C. Edward III (1980) dalam kerangka teorinya, keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi. Kegagalan dalam salah satu atau beberapa variabel ini dapat menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan yang di harapkan dengan hasil nyata yang di capai. Meskipun kebijakan pengembangan desa wisata Brakseng telah di gulirkan, muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng di Desa Sumber Brantas dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan desa wisata tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Lokasi penelitian dipilih karena Desa Sumber Brantas telah mengimplementasikan kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng yang berbasis kawasan pertanian, sehingga relevan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan. Fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu Sekretaris Desa Sumber Brantas, Direktur BUMDes, dan tiga orang petani sebagai masyarakat yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, serta peraturan yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Brakseng. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

HASIL

Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Brakseng

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dilaksanakan melalui keterlibatan Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan masyarakat petani. Pengembangan wisata diarahkan untuk memanfaatkan potensi kawasan pertanian sebagai daya tarik wisata tanpa menghilangkan fungsi utama lahan sebagai kawasan produktif. Pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Desa tentang pengembangan desa wisata.

Untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan di lapangan, penelitian ini menggunakan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian pada masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.

Komunikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumber Brantas melalui Musyawarah Desa (Musdes). Forum tersebut menjadi sarana penyampaian informasi mengenai tujuan pengembangan wisata, pembagian peran, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Informasi kebijakan disampaikan kepada masyarakat, khususnya petani yang lahannya berada di kawasan pengembangan wisata.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat petani telah memahami posisi dan perannya sebagai mitra dalam pengembangan wisata. Keterlibatan mereka tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan potensi lahan pertanian sebagai daya tarik wisata, tetapi juga menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian. Komunikasi antara Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat berlangsung sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengembangan wisata. Dengan demikian, penyampaian informasi kebijakan telah memberikan pemahaman mengenai tujuan program dan keterlibatan masing-masing pihak.



Gambar 1. Kegiatan Musyawarah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata

Sumber: Data Sekunder, 2025

Sumber Daya Kebijakan

Pada aspek sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Pengelolaan wisata saat ini dilaksanakan oleh BUMDes karena Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sudah tidak aktif. Struktur pengelola yang tersedia terdiri atas direktur, sekretaris, bendahara, dan kepala unit. Namun, para pengelola belum memperoleh pelatihan khusus di bidang kepariwisataan sehingga kapasitas pengelolaan wisata masih perlu ditingkatkan.

Keterbatasan juga ditemukan pada fasilitas pendukung kegiatan wisata. Area parkir dan toilet telah tersedia, tetapi kapasitasnya diperkirakan baru memenuhi sekitar 10–20% dari kebutuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mampu menunjang aktivitas wisatawan, khususnya ketika jumlah kunjungan meningkat. Selain itu, keterbatasan anggaran dan panjangnya prosedur pencairan dana desa turut memengaruhi kecepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.



Gambar 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Wisata Brakseng

Sumber: Data Sekunder, 2025



Gambar 3. Aktivitas Pertanian sebagai Daya Tarik Wisata Brakseng

Sumber: Data Sekunder, 2025

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat petani terhadap pengembangan Desa Wisata Brakseng. Pemerintah Desa memberikan dukungan melalui kebijakan dan penyediaan anggaran, sedangkan BUMDes bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional wisata. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa sekaligus membuka peluang kegiatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Masyarakat petani juga menunjukkan sikap mendukung pengembangan wisata karena kawasan pertanian memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Meskipun demikian, dukungan tersebut disertai harapan agar aktivitas wisata tidak mengganggu kegiatan pertanian. Petani menginginkan adanya pengaturan terhadap perilaku pengunjung, terutama agar wisatawan tidak memasuki area tanaman atau merusak komoditas pertanian ketika mengambil foto.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pengembangan wisata tetap berkaitan erat dengan perlindungan terhadap lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Aktivitas pertanian yang berlangsung di kawasan Brakseng sekaligus menjadi bagian dari daya tarik wisata yang dikembangkan.

Struktur Birokrasi

Pada indikator struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Desa dan BUMDes telah terbentuk. Pemerintah Desa berperan sebagai penanggung jawab kebijakan pengembangan wisata, sedangkan BUMDes menjalankan fungsi pengelolaan operasional di lapangan. Pembagian peran tersebut menjadi dasar koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Wisata Brakseng.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala administratif, terutama karena Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis belum selesai disusun. Dalam menjalankan kegiatan operasional, pengelola masih mengacu pada koordinasi internal dan ketentuan dalam AD/ART BUMDes. Selain itu, masih terdapat kebutuhan sinkronisasi antara administrasi pemerintah desa, pengelolaan BUMDes, dan prosedur penggunaan anggaran.

Dengan demikian, struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab telah tersedia, tetapi mekanisme operasional belum sepenuhnya didukung oleh pedoman tertulis yang terperinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administratif dan penyelesaian SOP masih menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga faktor utama yang mendukung implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng. Pertama, keberadaan Peraturan Desa sebagai landasan hukum pengembangan wisata. Regulasi tersebut memberikan dasar bagi Pemerintah Desa dan BUMDes dalam menjalankan kegiatan pengembangan serta pengelolaan wisata.

Kedua, adanya dukungan dari Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat petani. Pemerintah Desa memberikan dukungan kebijakan dan anggaran, BUMDes menjalankan pengelolaan operasional, sedangkan masyarakat petani mendukung pemanfaatan kawasan pertanian sebagai daya tarik wisata. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi unsur penting dalam keberlangsungan pengembangan wisata.

Ketiga, potensi alam dan pertanian kawasan Brakseng yang memiliki daya tarik tersendiri. Kawasan pertanian dataran tinggi dengan hamparan tanaman hortikultura, seperti kentang, wortel, kol, dan sawi putih, menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pemandangan alam, udara sejuk, dan aktivitas pertanian masyarakat merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai agrowisata tanpa harus mengubah fungsi utama lahan pertanian.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Di samping faktor pendukung, implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng masih menghadapi beberapa hambatan. Pertama, kendala administrasi dan sinkronisasi regulasi, terutama berkaitan dengan penyelarasan ketentuan administrasi pemerintah desa dan aturan internal BUMDes. Prosedur pencairan anggaran yang relatif panjang juga menyebabkan pemenuhan kebutuhan pembangunan fasilitas wisata tidak selalu dapat dilaksanakan dengan cepat.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Belum aktifnya Pokdarwis dan belum adanya pelatihan khusus bagi pengelola menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan wisata. Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti toilet dan tempat parkir masih memiliki kapasitas terbatas sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengunjung.

Ketiga, gangguan terhadap aktivitas dan kenyamanan masyarakat petani akibat kegiatan wisata. Mobilitas kendaraan pengunjung di kawasan pertanian terkadang menghambat aktivitas warga yang sedang bekerja di lahan. Selain itu, perilaku sebagian wisatawan yang memasuki area tanaman untuk berfoto berpotensi merusak komoditas pertanian milik masyarakat.

Keempat, ketidakpastian ekonomi pertanian dan risiko gagal panen. Fluktuasi harga komoditas sayuran di pasar serta kemungkinan terjadinya kerusakan atau kegagalan panen menyebabkan pendapatan petani tidak selalu stabil. Dalam kondisi tertentu, hasil pertanian hanya mampu menutup biaya produksi tanpa memberikan keuntungan yang memadai. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat yang menjadi bagian penting dalam pengembangan Desa Wisata Brakseng.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Brakseng

Implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan dukungan para pemangku kepentingan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan operasional. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Sumber Brantas telah menetapkan arah pengembangan wisata melalui Peraturan Desa dan melibatkan BUMDes serta masyarakat petani dalam pengelolaannya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

kebijakan masih menghadapi kesenjangan antara tujuan pengembangan wisata dengan kapasitas sumber daya dan tata kelola yang tersedia.

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menempatkan empat variabel sebagai penentu keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga kelemahan pada salah satu aspek dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan (Edward III, 1980). Berdasarkan temuan penelitian, implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam aspek komunikasi dan komitmen pelaksana, tetapi masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan proses penyampaian informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi informasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Dalam pengembangan Desa Wisata Brakseng, komunikasi kebijakan dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat, khususnya petani. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses penyampaian kebijakan tidak hanya berlangsung secara administratif, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami tujuan dan pembagian peran dalam pengembangan wisata.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat petani telah memahami posisinya sebagai mitra dalam pengembangan wisata, terutama dalam menjaga keberlanjutan fungsi lahan pertanian. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian pemahaman antara tujuan kebijakan pemerintah desa dengan kepentingan masyarakat sebagai pemilik dan pengelola aktivitas pertanian. Sebagaimana dijelaskan oleh Herdiana (2018), sosialisasi kebijakan publik merupakan bagian penting dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah.

Meskipun demikian, efektivitas komunikasi kebijakan tidak cukup hanya diukur dari tersampaikannya informasi dan adanya pemahaman masyarakat. Komunikasi juga perlu menghasilkan koordinasi yang mampu menyelesaikan persoalan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Brakseng, masih ditemukan gangguan aktivitas petani akibat mobilitas kendaraan dan perilaku wisatawan yang memasuki area tanaman. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap tujuan pengembangan wisata belum sepenuhnya diikuti mekanisme komunikasi operasional yang mampu mengatur interaksi antara pengunjung dan masyarakat petani.

Dengan demikian, komunikasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng dapat dikatakan telah berjalan cukup baik pada tahap sosialisasi dan pembentukan pemahaman, tetapi masih perlu diperkuat pada tingkat koordinasi operasional. Komunikasi tidak hanya diperlukan untuk menyampaikan tujuan kebijakan, melainkan juga untuk membangun kesepakatan mengenai tata tertib pengunjung, perlindungan lahan pertanian, dan pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan wisata.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Sumber daya merupakan variabel yang menentukan kemampuan pelaksana dalam merealisasikan kebijakan. Edward III (1980) menempatkan sumber daya sebagai salah satu faktor penting yang mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas pendukung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya masih menjadi salah satu kelemahan utama dalam implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng.

Keterbatasan tersebut terlihat dari belum aktifnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata. Pengelolaan wisata yang saat ini dilaksanakan oleh BUMDes belum sepenuhnya didukung tenaga pengelola yang memiliki pelatihan khusus di bidang kepariwisataan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan organisasi pengelola belum secara otomatis menjamin tersedianya kapasitas profesional untuk menjalankan kegiatan wisata.

Selain sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana juga memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Fasilitas parkir dan toilet yang masih terbatas menunjukkan bahwa pengembangan wisata belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Persoalan tersebut berkaitan pula dengan keterbatasan anggaran dan prosedur pencairan dana desa yang relatif panjang. Artinya, persoalan sumber daya tidak hanya menyangkut ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan organisasi dalam mengakses dan menggunakan sumber daya tersebut secara efektif.

Temuan ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara potensi wisata Brakseng dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Kawasan pertanian memiliki daya tarik alam yang kuat, tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya didukung fasilitas dan kemampuan manajerial yang memadai. Hal ini sejalan dengan pembahasan Krisnawati (2021) mengenai pentingnya program pengembangan desa wisata sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Pengembangan wisata membutuhkan dukungan pelaksanaan yang memadai agar potensi lokal dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, persoalan sumber daya di Brakseng tidak hanya berkaitan dengan kekurangan fasilitas fisik, tetapi juga dengan kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi pengelola. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan kepariwisataan, penguatan kembali fungsi kelembagaan pengelola, serta perbaikan fasilitas dasar menjadi kebutuhan penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan

Disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat petani memiliki dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata Brakseng. Pemerintah Desa memberikan dukungan kebijakan dan anggaran, BUMDes menjalankan pengelolaan operasional, sedangkan masyarakat petani mendukung pemanfaatan kawasan pertanian sebagai daya tarik wisata.

Dukungan tersebut menunjukkan adanya kesamaan kepentingan dalam mendorong pengembangan ekonomi desa melalui sektor pariwisata. Keterlibatan masyarakat petani juga memperlihatkan bahwa pengembangan desa wisata tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai pemilik potensi lokal. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan desa wisata yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pemanfaatan potensi alam, budaya, dan aktivitas ekonomi desa (Sudibya, 2018).

Namun, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat tidak bersifat tanpa syarat. Petani tetap mengutamakan perlindungan lahan pertanian karena sektor tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama. Kekhawatiran terhadap wisatawan yang memasuki area tanaman atau mengganggu aktivitas pertanian menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki pengembangan wisata yang tidak mengorbankan kepentingan ekonomi mereka.

Kondisi tersebut penting dipahami karena keberhasilan pengembangan desa wisata tidak cukup diukur dari meningkatnya aktivitas kunjungan wisatawan, tetapi juga

dari kemampuan pengelolaan wisata dalam memberikan manfaat tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat lokal. Dalam konteks Brakseng, komitmen masyarakat menjadi modal sosial yang penting, tetapi harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan terhadap lahan pertanian dan pengaturan aktivitas wisatawan.

Oleh karena itu, disposisi para pelaksana dalam pengembangan Desa Wisata Brakseng dapat dikatakan cukup mendukung. Akan tetapi, komitmen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tindakan pengelolaan yang lebih konkret, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pariwisata dan keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta keberadaan prosedur operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Desa dan BUMDes dalam pengembangan Desa Wisata Brakseng telah terbentuk. Pemerintah Desa berperan sebagai penanggung jawab kebijakan, sedangkan BUMDes menjalankan fungsi pengelolaan operasional wisata.

Meskipun demikian, belum terselesaikannya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis menunjukkan bahwa tata kelola operasional belum sepenuhnya terlembagakan. Pelaksanaan kegiatan masih mengandalkan koordinasi internal dan ketentuan AD/ART BUMDes. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembagian tugas secara organisatoris sudah tersedia, tetapi belum seluruhnya didukung pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan kegiatan secara terstandar.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberadaan struktur organisasi perlu diikuti mekanisme kerja yang jelas agar setiap pelaksana memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya. Tanpa SOP yang memadai, pelaksanaan kegiatan berpotensi bergantung pada kebiasaan dan koordinasi informal. Hal tersebut menjadi penting terutama dalam pengelolaan destinasi wisata yang melibatkan banyak kepentingan, seperti pengaturan pengunjung, pemanfaatan fasilitas, perlindungan lahan pertanian, dan koordinasi antara pemerintah desa dengan BUMDes.

Selain itu, kendala administrasi dan prosedur pencairan anggaran menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan belum sepenuhnya berjalan secara efisien. Persoalan ini memperlihatkan bahwa struktur birokrasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan organisasi, tetapi juga kemampuan organisasi dalam membangun prosedur kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, struktur birokrasi dalam pengembangan Desa Wisata Brakseng telah memiliki pembagian tanggung jawab dasar, tetapi masih memerlukan penguatan melalui penyelesaian SOP tertulis, penataan administrasi, dan peningkatan efektivitas koordinasi antara Pemerintah Desa dan BUMDes. Penguatan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya berjalan berdasarkan komitmen para pelaksana, tetapi juga memiliki sistem kerja yang jelas dan berkelanjutan.

Keterkaitan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata Brakseng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng dipengaruhi oleh keterkaitan antara faktor pendukung dan faktor penghambat. Keberadaan Peraturan Desa, dukungan Pemerintah Desa dan masyarakat, serta potensi alam kawasan pertanian merupakan modal utama dalam pengembangan wisata. Ketiga faktor tersebut memberikan dasar kelembagaan, sosial, dan ekonomi bagi keberlanjutan program.

Namun, keberadaan modal tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, prosedur administrasi, dan belum terselesaikannya SOP menjadi kendala yang memengaruhi kemampuan

pengelola dalam mengembangkan potensi wisata. Dengan kata lain, persoalan utama pengembangan Desa Wisata Brakseng bukan terletak pada ketiadaan potensi atau rendahnya dukungan masyarakat, melainkan pada kapasitas kelembagaan dan operasional dalam mengelola potensi tersebut.

Kondisi ini juga memperlihatkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pariwisata dan kepentingan ekonomi masyarakat petani. Aktivitas wisata memberikan peluang pemanfaatan kawasan pertanian sebagai daya tarik ekonomi, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan gangguan terhadap aktivitas produksi apabila tidak diatur dengan baik. Selain itu, ketidakpastian harga komoditas dan risiko gagal panen menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata belum dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi bagi persoalan ekonomi masyarakat pertanian.

Oleh karena itu, pengembangan Desa Wisata Brakseng perlu diarahkan pada penguatan tata kelola yang mampu mengintegrasikan kepentingan pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat petani. Perbaikan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas dasar, penyelesaian SOP, serta pengaturan aktivitas wisatawan menjadi aspek penting dalam memperkuat implementasi kebijakan. Dengan demikian, keberlanjutan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh daya tarik alam dan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan dalam memastikan bahwa aktivitas pariwisata berjalan sejalan dengan perlindungan lahan pertanian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengembangan Desa Wisata Brakseng di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan dukungan Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat petani. Berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi dan disposisi menunjukkan kondisi yang cukup baik melalui sosialisasi kebijakan, koordinasi, serta komitmen para pelaksana. Sementara itu, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, fasilitas pendukung, prosedur administrasi, dan belum terselesaikannya SOP tertulis. Faktor pendukung implementasi meliputi keberadaan Peraturan Desa sebagai landasan hukum, dukungan para pemangku kepentingan, serta potensi alam dan pertanian Brakseng sebagai daya tarik wisata. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan sarana prasarana, panjangnya prosedur pencairan anggaran, gangguan aktivitas pertanian akibat perilaku wisatawan, serta ketidakpastian ekonomi dan risiko gagal panen. Oleh karena itu, pengembangan Desa Wisata Brakseng memerlukan penguatan kapasitas pengelola, penyelesaian SOP, peningkatan fasilitas dasar, dan pengaturan aktivitas wisatawan. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan seimbang dengan perlindungan lahan pertanian dan kepentingan ekonomi masyarakat setempat.

REFERENSI

Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy* (2nd ed.). Congressional Quarterly Press.

Ekel, A. F. (2020). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis agrowisata di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik, 6*(92).

Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1*(3), 13–26.

Krisnawati, I. (2021). Program pengembangan desa wisata sebagai wujud kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid dan implementasinya. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 4*(2), 211–221. https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1974

Kusumawardani, R. A., & Soelistyo, A. (2022). Pengaruh bantuan pemerintah dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Wisata Petik Sayur Sumberejo Kota Batu. *Journal of Economic and Social Empowerment, 2*(1), 30–36. https://doi.org/10.22219/joesment.v1i02.18754

Mansur, J. (2021). Implementasi konsep pelaksanaan kebijakan dalam publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 6*(2), 324–334.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik, 6*(2), 195–224.

Nurhalimah, Z. (2024). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah (Studi pada Destinasi Wisata Balong Kawuk Desa Sumberejo Kabupaten Tulungagung). *Publiciana, 17*(2), 140–147.

Pramono, J. (2020). *Evaluasi dan implementasi kebijakan publik*. UNISRI Press.

Salsabila, D. N. A., Sumartono, & Saleh, C. (2024). Implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 23*(3), 2091–2112. https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.6546

Sherly, F. S. (2023). Implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Respon Publik, 17*(6).

Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan publik*. SAH Media.

Sudibya, B. (2018). Wisata desa dan desa wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali, 1*(1), 22–26. https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Tamarully, K. A., Sukowiyono, G., & Adi Putra, G. (2022). Desa edu wisata Sumberejo di Kota Batu tema: Arsitektur hijau. *Pengilon: Jurnal Arsitektur, 6*(2).

Tyas, N. W., & Damayanti, M. (2018). Potensi pengembangan Desa Kliwonan sebagai desa wisata batik di Kabupaten Sragen. *Journal of Regional and Rural Development Planning, 2*(1), 74–89. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.74-89

Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata* (Cetakan ke-2). Pradnya Paramita.